# PERUBAHAN
# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPKPD Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini, mengacu kepada Perencanaan Startegis, dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pagu anggaran yang tersedia. Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika : Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu, Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Penutup.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini maka program dan kegiatan-kegiatan yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Gunung tua, 28 Juli 2025

**KEPALA BADAN PKPD**
**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**BANGUN PARLAUNGAN, SE, MM**
**PEMBINA TK. I**
**NIP. 19821201 200904 1 003**

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR..... 2**
**DAFTAR ISI..... 3**
**DAFTAR TABEL..... 4**
**BAB I PENDAHULUAN..... 5**
1.1. Latar Belakang..... 5
1.2. Landasan Hukum..... 7
1.3. Maksud dan Tujuan..... 8
1.4. Sistematika Penulisan..... 9
**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI TAHUN LALU ..... 10**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD sampai Triwulan II ..... 10
**BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN..... 41**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah ..... 41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD ..... 43
3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 ..... 45
**BAB IV PENUTUP..... 56**

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD sampai Tahun lalu ..... 11

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan ..... 47

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Perumusan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja BPKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan tahunan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang menerjemahkan visi, misi dan program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan diselaraskan dengan kebijakan dan strategis Pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan dalam merumuskan Program dan Kegiatan yang akan dimasukan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Renja digunakan untuk mengetahui sejauh mana capaian Program dan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan terhadap sasaran dan target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Selain itu untuk mencapai visi misi ke RPJMD, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Dimana Rencana Kerja (Renja) SKPD ini selain akan menjadi acuan usulan program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban

menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 menjadi acuan dan merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dalam penyusunannya, Renja ini berpedoman pada RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, sehingga Renja ini sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPD. Dalam Renstra ini termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 disusun melalui proses penyusunan Renja sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan 1.1.**
**Kaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lain**

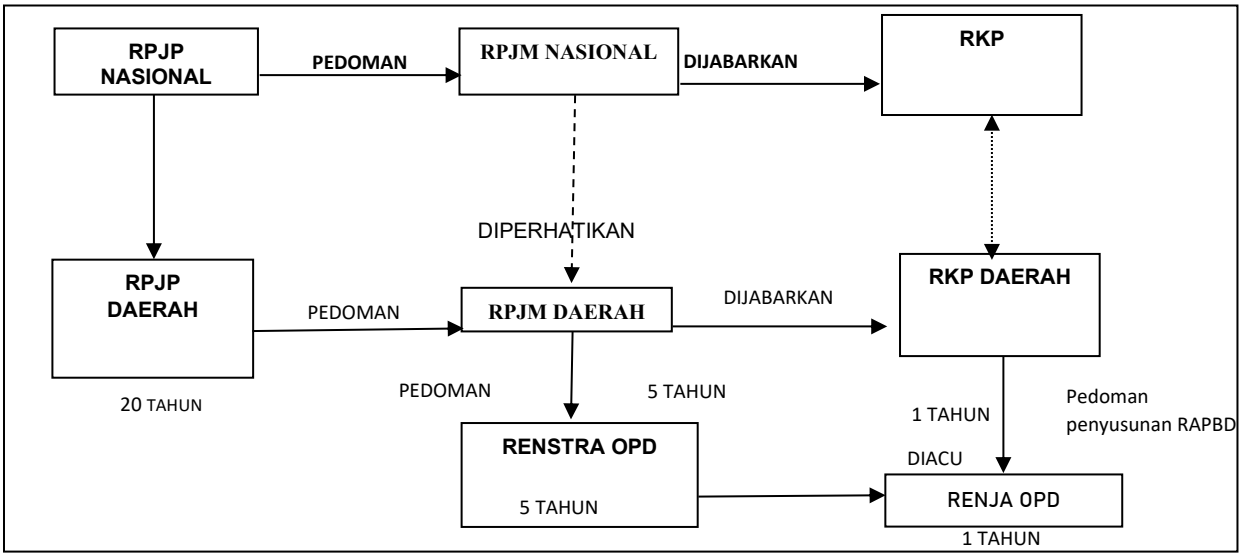

## 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2023 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025;

## 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan juga sebagai perencanaan program dan kegiatan yang akan disusun kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) OPD ini adalah untuk mengidentifikasikan program dan kegiatan yang akan menjadi usulan OPD ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 Kabupaten Padang Lawas Utara.

## 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renja OPD

2.2. Analis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja OPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran OPD

3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKPD

BAB V PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA BPKPD TAHUN LALU

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja BPKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini, didasarkan atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan Renstra.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahap Penyajian Renja Perangkat Daerah, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | | | 465 | 9.237.471.405 | 460 | 361.077.256.831 | 38 | 19.552.222.865 | 13 | 11.559.718.475 | - | - | - | - | | 31.111.941.340 | | 392.814.348.171 | 38,96% | 24,84% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN |
| 1,1 | | 5.02.02.5 | " Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah " | Jumlah Subkegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | 124 | 220.747.300 | 124 | 220.747.300 | 30 | 51.894.000 | 6 | 42.000.000 | - | - | - | - | 36 | 93.894.000 | 160 | 314.641.300 | 64,23% | 43,02% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.1.1 | | | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | 1 | 96.210.900 | 1 | 96.210.900 | | 15.000.000 | 1 | 30.000.000 | | - | | | 1 | 45.000.000 | 2 | 141.210.900 | 100,00% | 46,77% | |
| 1.1.2 | | | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 123 | 124.536.400 | 123 | 124.536.400 | 30 | 36.894.000 | 5 | 12.000.000 | | | | | 35 | 48.894.000 | 158 | 173.430.400 | 28,46% | 39,26% | |
| 1,2 | | 5.02.02.1 | "Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah" | Cakupan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 14 | 1.166.906.000 | 10 | 1.166.906.000 | 2 | 167.912.000 | - | 35.918.000 | - | - | - | - | 2 | 203.830.000 | 12 | 1.370.736.000 | 25,00% | 10,75% | |
| 1.2.1 | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | 3 | 64.624.000 | 3 | 64.624.000 | | | | | | | | | - | - | 3 | 64.624.000 | 0,00% | 0,00% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.2.2 | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | | 3 | 65.274.000 | 3 | 65.274.000 | | | | | | | | | - | - | 3 | 65.274.000 | 0,00% | 0,00% | |
| 1.2.5 | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | 2 | 723.434.000 | 2 | 723.434.000 | 1 | 121.681.000 | - | - | | | | | 1 | 121.681.000 | 3 | 845.115.000 | 50,00% | 16,82% | |
| 1.2.6 | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | 2 | 313.574.000 | 2 | 313.574.000 | 1 | 46.231.000 | - | 35.918.000 | | | | | 1 | 82.149.000 | 3 | 395.723.000 | 50,00% | 26,20% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1,3 | | 5.02.02.3 | Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah | Cakupan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan | | | 62 | 894.432.800 | 62 | 645.332.500 | 4 | 229.501.500 | 4 | 260.141.425 | - | - | - | - | 8 | 489.642.925 | 70 | 1.134.975.425 | 28,57% | 31,36% | |
| 1.3.1 | | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | 12 | 54.198.200 | 12 | 54.198.200 | 3 | 8.000.000 | 3 | 16.000.000 | | | | | 6 | 24.000.000 | 18 | 78.198.200 | 50,00% | 44,28% | |
| 1.3.2 | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | 4 | 25.831.600 | 4 | 25.831.600 | | | | | | | | | - | - | 4 | 25.831.600 | 0,00% | 0,00% | |
| 1.3.3 | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | | | 1 | 332.050.500 | 1 | 332.050.500 | 1 | 221.501.500 | - | 96.007.500 | | | | | 1 | 317.509.000 | 2 | 649.559.500 | 100,00% | 95,62% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.3.4 | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | 2 | 186.106.300 | 2 | 186.106.300 | - | - | 1 | 148.133.925 | | | | | 1 | 148.133.925 | 3 | 334.240.225 | 50,00% | 79,60% | |
| 1.3.5 | | 5.02.02.3.5 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | 1 | 28.689.800 | 1 | 28.689.800 | | | | | | | | | - | - | 1 | 28.689.800 | 0,00% | 0,00% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.3.6 | | 5.02.02.3.6 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 1 | 9.735.300 | 1 | 9.735.300 | | | | | | | | | - | - | 1 | 9.735.300 | 0,00% | 0,00% | |
| 1.3.7 | | 5.02.02.3.7 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 41 | 8.720.800 | 41 | 8.720.800 | | | | | | | | | - | - | 41 | 8.720.800 | 0,00% | 0,00% | |
| 1,4 | | 5.02.02.2 | Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Cakupan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaaan Daerah | | | 259 | 7.890.632.966 | 258 | 7.890.632.966 | 1 | 393.030.215 | 1 | 39.376.000 | - | - | - | - | 2 | 432.406.215 | 260 | 8.323.039.181 | 21,43% | 21,98% | |
| 1.4.1 | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | 1 | 178.982.800 | 1 | 178.982.800 | 1 | 141.711.740 | | 12.000.000 | | | | | 1 | 153.711.740 | 2 | 332.694.540 | 100,00% | 85,88% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.4.2 | | 5.02.02.2.2 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | 200 | 6.260.000 | 200 | 6.260.000 | | | | | | | | | - | - | 200 | 6.260.000 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 1.4.3 | | | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | 1 | 7.558.122.966 | 1 | 7.558.122.966 | | 235.706.475 | | | | | | | - | 235.706.475 | 1 | 7.793.829.441 | 0,00 % | 3,12 % | |
| 1.4.4 | | 5.02.02.2.4 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | 41 | 7.014.000 | 41 | 7.014.000 | | | | | | | | | - | - | 41 | 7.014.000 | 0,00 % | 0,00 % | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.4.5 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dal | | | 2 | 79.196.000 | 2 | 79.196.000 | | 5.706.000 | 1 | 23.376.000 | | | | | 1 | 29.082.000 | 3 | 108.278.000 | 50,00% | 36,72% | |
| 1.4.6 | | 5.02.02.2.6 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | 12 | 11.627.200 | 12 | 11.627.200 | | | | | | | | | - | - | 12 | 11.627.200 | 0,00% | 0,00% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.4.8 | | 5.02.02.2.8 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | 1 | 49.430.000 | 1 | 49.430.000 | | 9.906.000 | | 4.000.000 | | | | | - | 13.906.000 | 1 | 63.336.000 | 0,00% | 28,13% | |
| 1,5 | | 5.02.02.4 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Subkegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 6 | 5.893.680.894 | 6 | 351.153.638.065 | 1 | 18.709.885.150 | 2 | 11.182.283.050 | - | - | - | - | 3 | 29.892.168.200 | 9 | 381.670.956.265 | 55,56% | 17,10% | |
| 1.5.1 | | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | 3 | 343.117.697.400 | 3 | 343.117.697.400 | 1 | 18.213.385.150 | 1 | 10.389.733.050 | | | | | 2 | 28.603.118.200 | 5 | 371.720.815.600 | 66,67% | 8,34% | |
| 1.5.2 | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | 1 | 3.000.000.000 | 1 | 3.000.000.000 | | 496.500.000 | 1 | 792.550.000 | | | | | 1 | 1.289.050.000 | 2 | 4.289.050.000 | 100,00% | 42,97% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.5.3 | | | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | 2 | 5.661.090.665 | 2 | 5.035.940.665 | | | | | | | | | - | - | 2 | 5.661.090.665 | 0,00% | 0,00% | |
| Rata- Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,96% | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | | | | | |
| 1 | Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | | | - | 71.850.000 | 3 | 2.522.599.800 | 25 | 605.868.802 | 28 | 613.061.764 | - | - | - | - | 53 | 1.218.930.566 | 201 | 3.741.530.366 | 56,59% | 56,75% | |
| 1,1 | | 5.02.01.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3 | 35.925.000 | 3 | 35.925.000 | 1 | 16.462.500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16.462.500 | 4 | 52.387.500 | 50,00% | 50,00% | |
| | | 5.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | | | | | | | | | - | - | 1 | 3.000.000 | 0,00% | 0,00% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.1.3 | | 5.02.01.3.3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 1 | 16.462.500 | 1 | 16.462.500 | 1 | 16.462.500 | | | | | | | 1 | 16.462.500 | 2 | 32.925.000 | 100,00% | 100,00% | |
| 1.1.4 | | 5.02.01.3.4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 1 | 16.462.500 | 1 | 16.462.500 | | | | | | | | | - | - | 1 | 16.462.500 | 0,00% | 0,00% | |
| 1,2 | | 5.02.01.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah | | | 5 | 338.627.900 | 5 | 338.627.900 | - | 49.865.000 | 2 | 102.425.300 | - | - | - | - | 2 | 152.290.300 | 7 | 490.918.200 | 50,00% | 60,34% | |
| 1.2.1 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1 | 17.737.700 | 1 | 17.737.700 | | | 1 | 17.737.700 | | | | | 1 | 17.737.700 | 2 | 35.475.400 | 100,00% | 100,00% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.2.2 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 1 | 10.850.100 | 1 | 10.850.100 | | | 1 | 10.850.100 | | | | | 1 | 10.850.100 | 2 | 21.700.200 | 100,00% | 100,00% | |
| 1.2.3 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | 2 | 10.850.100 | 2 | 10.850.100 | | | - | - | | | | | - | - | 2 | 10.850.100 | 0,00% | 0,00% | |
| 1.2.4 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 1 | 299.190.000 | 1 | 299.190.000 | | 49.865.000 | | 73.837.500 | | | | | - | 123.702.500 | 1 | 422.892.500 | 0,00% | 41,35% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1,3 | | 5.02.01.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 81 | 832.656.300 | 81 | 832.656.300 | 8 | 181.690.110 | 14 | 185.274.350 | - | - | - | - | 22 | 366.964.460 | 103 | 1.199.620.760 | 18,37% | 32,34% | |
| 1.3.1 | | 5.02.01.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 1 | 13.198.000 | 1 | 13.198.000 | | - | | | | | | | - | - | 1 | 13.198.000 | 0,00% | 0,00% | |
| 1.3.2 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 1 | 293.426.800 | 1 | 293.426.800 | | 71.344.800 | | 71.344.800 | | | | | - | 142.689.600 | 1 | 436.116.400 | 0,00% | 48,63% | |
| 1.3.3 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | 1 | 45.213.600 | 1 | 45.213.600 | | 10.415.500 | | 9.376.900 | | | | | - | 19.792.400 | 1 | 65.006.000 | 0,00% | 43,78% | |
| 1.3.4 | | 5.02.01.4.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 2 | 67.464.400 | 2 | 67.464.400 | 1 | 13.071.200 | | 11.968.800 | | | | | 1 | 25.040.000 | 3 | 92.504.400 | 50,00% | 37,12% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.3.5 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | 2 | 78.543.500 | 2 | 78.543.500 | 1 | 19.028.700 | | 19.028.700 | | | | | 1 | 38.057.400 | 3 | 116.600.900 | 50,00% | 48,45% | |
| 1.3.6 | | 5.02.01.4.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | 4 | 42.624.000 | 4 | 42.624.000 | | | | | | | | | - | - | 4 | 42.624.000 | 0,00% | 0,00% | |
| 1.3.7 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 70 | 292.186.000 | 70 | 292.186.000 | 6 | 67.829.910 | 14 | 73.555.150 | | | | | 20 | 141.385.060 | 90 | 433.571.060 | 28,57% | 48,39% | |
| 1,4 | | 5.02.01.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 19 | 257.710.000 | 19 | 257.710.000 | 5 | 79.357.095 | 6 | 55.367.500 | - | - | - | - | 11 | 134.724.595 | 30 | 392.434.595 | 77,78% | 43,21% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.4.1 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | 18 | 231.500.000 | 18 | 231.500.000 | 5 | 79.357.095 | 5 | 47.027.500 | | | | | 10 | 126.384.595 | 28 | 357.884.595 | 55,56% | 54,59% | |
| 1.4.2 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 1 | 26.210.000 | 1 | 26.210.000 | | | 1 | 8.340.000 | | | | | 1 | 8.340.000 | 2 | 34.550.000 | 100,00% | 31,82% | |
| 1,5 | | 5.02.01.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2 | 277.385.000 | | 277.385.000 | 1 | 144.990.000 | 1 | 80.000.000 | - | - | - | - | 2 | 224.990.000 | 4 | 502.375.000 | 100,00% | 86,73% | |
| 1.5.1 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | 1 | 197.385.000 | 1 | 197.385.000 | 1 | 144.990.000 | | | | | | | 1 | 144.990.000 | 2 | 342.375.000 | 100,00% | 73,46% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.5.2 | | 5.02.01.5.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | | | 1 | 80.000.000 | | | | | 1 | 80.000.000 | 2 | 160.000.000 | 100,00% | 100,00% | |
| 1,6 | | 5.02.01.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 27 | 716.497.000 | 27 | 716.497.000 | 4 | 86.761.097 | 4 | 183.364.014 | - | - | - | - | 8 | 270.125.111 | 35 | 986.622.111 | 16,67% | 35,63% | |
| 1.6.1 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 2 | 12.000.000 | 2 | 12.000.000 | | - | | 5.000.000 | | | | | - | 5.000.000 | 2 | 17.000.000 | 0,00% | 41,67% | |
| 1.6.2 | | 5.02.01.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 12 | 351.200.000 | 12 | 351.200.000 | 2 | 34.047.097 | 2 | 81.061.164 | | | | | 4 | 115.108.261 | 16 | 466.308.261 | 33,33% | 32,78% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.6.3 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 1 | 22.625.000 | 1 | 22.625.000 | | 5.514.000 | | | | | | | - | 5.514.000 | 1 | 28.139.000 | 0,00% | 24,37% | |
| 1.6.4 | | 5.02.01.6.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 12 | 330.672.000 | 12 | 330.672.000 | 2 | 47.200.000 | 2 | 97.302.850 | | | | | 4 | 144.502.850 | 16 | 475.174.850 | 33,33% | 43,70% | |
| 1,7 | | 5.02.01.1 | Perencaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja | | | 14 | 63.798.600 | 11 | 63.798.600 | 6 | 46.743.000 | 1 | 6.630.600 | - | - | - | - | 7 | 53.373.600 | 18 | 117.172.200 | 83,33% | 89,00% | |
| 1.7.1 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 6 | 23.686.200 | 6 | 23.686.200 | 1 | 6.630.600 | 1 | 6.630.600 | | | | | 2 | 13.261.200 | 8 | 36.947.400 | 33,33% | 55,99% | |
| 1.7.4 | | 5.02.01.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | 1 | 9.418.500 | 1 | 9.418.500 | 1 | 9.418.500 | | | | | | | 1 | 9.418.500 | 2 | 18.837.000 | 100,00% | 100,00% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 1.7.6 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 2 | 16.475.400 | 2 | 16.475.400 | 2 | 16.475.400 | | | | | | | | 2 | 16.475.400 | 4 | 32.950.800 | 100,00% | 100,00% | |
| 1.7.7 | | 5.02.01.1.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2 | 14.218.500 | 2 | 14.218.500 | 2 | 14.218.500 | | | | | | | | 2 | 14.218.500 | 4 | 28.437.000 | 100,00% | 100,00% | |
| \ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,59% | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | | | 13 | 1.314.953.073 | 14 | 721.072.900 | - | 52.764.000 | 3 | 142.417.400 | - | - | - | - | 3 | 195.181.400 | 17 | 916.254.300 | 16,67% | 22,03% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 2,1 | | 5.02.03.1 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Subkegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 13 | 721.072.900 | 14 | 721.072.900 | - | 52.764.000 | 3 | 142.417.400 | - | - | - | - | 3 | 195.181.400 | 17 | 916.254.300 | 16,67% | 22,03% | |
| 2.1.1 | | | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | | | 1 | 59.616.000 | 1 | 59.616.000 | | | | | | | | | - | - | 1 | 59.616.000 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.1.2 | | 5.02.03.1.2 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 1 | 13.494.000 | 1 | 13.494.000 | | | | | | | | | - | - | 1 | 13.494.000 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.1.3 | | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 2 | 29.995.500 | 2 | 29.995.500 | | | 1 | 25.315.500 | | | | | 1 | 25.315.500 | 3 | 55.311.000 | 50,00% | 84,40% | |
| 2.1.4 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | 2 | 262.151.200 | 2 | 262.151.200 | | 27.600.000 | 1 | 49.252.800 | | | | | 1 | 76.852.800 | 3 | 339.004.000 | 50,00% | 29,32% | |
| | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | | 1 | 25.896.000 | 1 | 25.896.000 | | | | | | | | | - | - | 1 | 25.896.000 | 0,00% | 0,00% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 2.1.5 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | | 1 | 207.320.200 | 1 | 207.320.200 | | 15.300.000 | | 23.286.600 | | | | | - | 38.586.600 | 1 | 245.906.800 | 0,00% | 18,61% | |
| 2.1.6 | | 5.02.03.1.6 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | 2 | 25.068.000 | 2 | 25.068.000 | | | | | | | | | - | - | 2 | 25.068.000 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.1.7 | | 5.02.03.1.7 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | 2 | 14.988.000 | 2 | 14.988.000 | | | | | | | | | - | - | 2 | 14.988.000 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.1.8 | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | 2 | 82.544.000 | 2 | 82.544.000 | | 9.864.000 | 1 | 44.562.500 | | | | | 1 | 54.426.500 | 3 | 136.970.500 | 50,00% | 65,94% | |
| Rata- Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,67% | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 3 | Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | indek Reformasi Birokrasi | | | - | 1.802.000.100 | 83 | 1.802.000.100 | 10 | 455.652.000 | 16 | 518.901.800 | - | - | - | - | 26 | 974.553.800 | 109 | 2.776.553.900 | 0,00% | 52,18% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN |
| 3,1 | | 5.02.04.1 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Subkegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 95 | 1.802.000.100 | 83 | 1.802.000.100 | 10 | 455.652.000 | 16 | 518.901.800 | - | - | - | - | 26 | 974.553.800 | 109 | 2.776.553.900 | | 52,18% | |
| 3.1.1 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | 12 | 346.500.200 | 12 | 346.500.200 | 2 | 31.250.000 | 2 | 144.702.000 | | | | | 4 | 175.952.000 | 16 | 522.452.200 | 33,33% | 50,78% | |
| 3.1.2 | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | 12 | 74.375.000 | 12 | 74.375.000 | | | 2 | 9.507.800 | | | | | 2 | 9.507.800 | 14 | 83.882.800 | 16,67% | 12,78% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| 3.1.4 | | | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | | | 12 | 826.543.700 | 12 | 826.543.700 | 4 | 281.161.000 | 4 | 235.164.000 | | | | | 8 | 516.325.000 | 20 | 1.342.868.700 | 66,67% | 62,47% | |
| 3.1.5 | | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | 34 | 124.618.000 | 34 | 124.618.000 | 4 | 105.047.000 | 3 | 12.427.800 | | | | | 7 | 117.474.800 | 41 | 242.092.800 | 20,59% | 94,27% | |
| 3.1.6 | | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | 1 | 400.568.000 | 1 | 400.568.000 | | 38.194.000 | 1 | 99.974.000 | | | | | 1 | 138.168.000 | 2 | 538.736.000 | 100,00% | 34,49% | |
| 3.1.7 | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | 12 | 29.395.200 | 12 | 29.395.200 | | | 4 | 17.126.200 | | | | | 4 | 17.126.200 | 16 | 46.521.400 | 33,33% | 58,26% | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024-2029 | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun lalu n-2 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara s/d Tahun 2026 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 =7+13 | | 1500,00% | | 16 |
| Rata- Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | | | | | |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang lawas Utara didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stratejik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023

| NO | Indikator *) | Target SPM | Target IKK | Target Renstra OPD | Realisasi Tahun ke- | Rasio Capaian pada Tahun ke- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Standar Nasional | (Permendagri 18) | Tahun 2023 | Tahun 2023 | Tahun 2023 |
| 1 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu | | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 3 | Optimalisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah | | | 15.007.328.707 | 18.926.632.967 | 126% |
| 4 | Pengamanan Aset | | | 100% | 75% | 75% |
| 1 | | | Rasio Belanja Pegawai luar Guru dan tenaga kesehatan | 10 | 0,6 | 6% |
| 2 | | | Rasio PAD | 447 | 98,9 | 22% |
| 3 | | | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) | 48 | 56,19 | 117% |
| 4 | | | Opini Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP |
| 5 | | | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | -5,5 | 8,9 | -162% |
| 6 | | | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | -9,9 | 15,38 | -155% |
| 7 | | | Manajemen asset | 8,5 | 75% | 9% |
| 8 | | | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | 800.000.000.000 | 54.188.621.573 | 7% |

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026

| NO | Indikator *) | Target SPM | Target IKK | Target Renstra OPD | | | | | | Realisasi Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Standar Nasional | (Permendagri 18) | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 1 | Nilai Akip BPKPD | | | 66,87 | Nilai | 71,87 | Nilai | 76,87 | Nilai | | Nilai | | Nilai | | Nilai | | | |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD | | | 78 | Nilai | 80 | Nilai | 82 | Nilai | | Nilai | | Nilai | | Nilai | | | |
| 3 | Penetapan APBD | | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | | |
| 4 | Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah | | | 3,71 | % | 4,03 | % | 4,26 | % | | % | | % | | % | | | |
| 5 | Persentase Aset yang dikelola | | | 70 | % | 75 | % | 80 | % | | % | | % | | % | | | |
| 1 | | | Rasio Belanja Pegawai luar Guru dan tenaga Kesehatan | 0,6 | % | 0,7 | % | 0,8 | % | | % | | % | | % | | | |
| 2 | | | Rasio PAD | 20 | % | 25 | % | 30 | % | | % | | % | | % | | | |
| 3 | | | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) | 45 | % | 46 | % | 47 | % | | % | | % | | % | | | |
| 4 | | | Opini Laporan Keuangan | WTP | Opini | WTP | Opini | WTP | Opini | | Opini | | Opini | | Opini | | | |
| 5 | | | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | 3,40 | % | 3,50 | % | 3,60 | % | | % | | % | | % | | | |
| 6 | | | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | 16 | % | 16 | % | 16 | % | | % | | % | | % | | | |
| 7 | | | Manajemen asset | 70 | % | 75 | % | 80 | % | | % | | % | | % | | | |
| 8 | | | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | 19 | % | 18 | % | 17 | % | | % | | % | | % | | | |

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam hal ini, yang mempunyai tugas koordinasi antara lain di bidang :

a. Sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai;
b. Pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi disetiap OPD belum optimal;
c. Belum memakainya SOP (Standard Operating Procedure) yang menjadi pedoman bagi personil PD dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;
d. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel;
e. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
f. Masih adanya aset di BPKPD yang belum dioptimalkan;
g. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan asset;
h. Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan aset belum jelas;
i. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah; Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset - aset bermasalah;

Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan maka isu-isu strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah:

1.1 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, yang diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi daridilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

2.1 Penerapan Teknologi Informasi, yang diarahkan untuk mempercepat pelayanan secara on-line dan terintegrasi.

## 2.4. Review Terhadap Renja OPD

Program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD dikaji dan dianalisa berdasarkan tingkat kebutuhan secara teknis pada penyelenggaraan kegiatan di masing-masing OPD. Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sendiri terdapat beberapa rumusan Program/kegiatan baru yang tidak terdapat pada Renja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Review terhadap Renja tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara

| NO | RANCANGAN RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Badan PKPD** | **NILAI AKIP** | **71,87 Nilai** | **15.673.596.279** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Badan PKPD** | **NILAI AKIP** | **71,87 Nilai** | **15.673.596.279** | |
| **1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja** | **7 Dok** | **66.586.500** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja** | **7 Dok** | **66.586.500** | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dok | 14.097.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dok | 14.097.000 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dok | 7.078.500 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dok | 7.078.500 | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dok | 7.078.500 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dok | 7.078.500 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dok | 7.078.500 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dok | 7.078.500 | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dok | 7.078.500 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dok | 7.078.500 | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Badan PKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Lap | 17.097.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Badan PKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Lap | 17.097.000 | |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Lap | 7.078.500 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Lap | 7.078.500 | |
| **2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Badan PKPD** | **Persentase realisasi anggaran BPKPD** | **93 persen** | **13.028.607.879** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Badan PKPD** | **Persentase realisasi anggaran BPKPD** | **93 persen** | **13.028.607.879** | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Badan PKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Org/Bln | 12.406.123.779 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Badan PKPD | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Org/Bln | 12.406.123.779 | |

| NO | RANCANGAN RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dok | 557.400.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dok | 557.400.000 | |
| 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dok | 25.517.100 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dok | 25.517.100 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Badan PKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Lap | 20.251.500 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Badan PKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Lap | 20.251.500 | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Badan PKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Lap | 19.315.500 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Badan PKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Lap | 19.315.500 | |
| **3** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **3 Dok** | **71.025.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah** | **3 Dok** | **71.025.000** | |
| 1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Badan PKPD | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 24.000.000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Badan PKPD | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 24.000.000 | |
| 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Badan PKPD | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 5.535.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Badan PKPD | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 5.535.000 | |
| 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dok | 20.745.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dok | 20.745.000 | |
| 4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dok | 20.745.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dok | 20.745.000 | |
| **4** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian** | **3 Dok** | **1.261.843.700** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian** | **3 Dok** | **1.261.843.700** | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Badan PKPD | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 13.198.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Badan PKPD | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 13.198.000 | |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Badan PKPD | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 268.485.100 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Badan PKPD | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 268.485.100 | |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Badan PKPD | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 19.046.600 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Badan PKPD | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 19.046.600 | |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Badan PKPD | Jumlah Paket Bahan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 73.100.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Badan PKPD | Jumlah Paket Bahan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 73.100.000 | |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Badan PKPD | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 42.472.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Badan PKPD | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 42.472.000 | |

| NO | RANCANGAN RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dok | 44.424.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dok | 44.424.000 | |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Lap | 801.118.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Lap | 801.118.000 | |
| **5** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Badan PKPD | **Jumlah pengadaan kenderaan dinas operasional** | **2 Unit** | **85.543.200** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Badan PKPD | **Jumlah pengadaan kenderaan dinas operasional** | **2 Unit** | **85.543.200** | |
| 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Badan PKPD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 5.543.200 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Badan PKPD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 5.543.200 | |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Badan PKPD | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 80.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Badan PKPD | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 80.000.000 | |
| **6** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **4 Lap** | **823.200.000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **4 Lap** | **823.200.000** | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Lap | 10.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Lap | 10.000.000 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lap | 324.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lap | 324.000.000 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Lap | 57.200.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Lap | 57.200.000 | |
| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Lap | 432.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Lap | 432.000.000 | |
| **7** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah pemeliharaan barang** | **2 Unit** | **336.790.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah pemeliharaan barang** | **2 Unit** | **336.790.000** | |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Badan PKPD | Jumlah kenderaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 18 Unit | 326.010.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Badan PKPD | Jumlah kenderaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 18 Unit | 326.010.000 | |
| 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Badan PKPD | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 10.780.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Badan PKPD | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 10.780.000 | |
| **2** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Badan PKPD** | **PENETAPAN APBD** | **Tepat Waktu Tepat Waktu** | **369.729.994.521** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Badan PKPD** | **PENETAPAN APBD** | **Tepat Waktu Tepat Waktu** | **369.729.994.521** | |
| **1** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah dokumen rencana anggaran daerah** | **8 Subkegiatan** | **1.199.996.600** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah dokumen rencana anggaran daerah** | **8 Subkegiatan** | **1.199.996.600** | |
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Badan PKPD | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 3 Dok | 52.313.000 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Badan PKPD | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 3 Dok | 52.313.000 | |

| NO | RANCANGAN RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 3 Dok | 52.193.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 3 Dok | 52.193.000 | |
| 3 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Badan PKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dok | 25.537.000 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Badan PKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dok | 25.537.000 | |
| 4 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Badan PKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dok | 25.537.000 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Badan PKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dok | 25.537.000 | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Badan PKPD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dok | 732.291.000 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Badan PKPD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dok | 732.291.000 | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Badan PKPD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dok | 158.018.500 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Badan PKPD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dok | 158.018.500 | |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dok | 101.743.000 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dok | 101.743.000 | |
| 8 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Badan PKPD | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 50 Orang | 52.364.100 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Badan PKPD | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 50 Orang | 52.364.100 | |
| **2** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah Laporan Perbendaharaan Daerah** | **7 Subkegiatan** | **11.073.174.283** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah Laporan Perbendaharaan Daerah** | **7 Subkegiatan** | **11.073.174.283** | |
| 1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 1 Dok | 127.580.000 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 1 Dok | 127.580.000 | |
| 2 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 200 Dok | 19.400.000 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 200 Dok | 19.400.000 | |
| 3 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 1 Dok | 10.775.641.783 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 1 Dok | 10.775.641.783 | |
| 4 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 1 Dok | 13.847.500 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 1 Dok | 13.847.500 | |
| 5 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 41 Dok | 19.626.400 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 41 Dok | 19.626.400 | |

| NO | RANCANGAN RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Badan PKPD | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PelaksanaanPemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 2 Lap | 68.695.400 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Badan PKPD | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PelaksanaanPemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 2 Lap | 68.695.400 | |
| 7 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 12 Dok | 39.103.200 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 12 Dok | 39.103.200 | |
| 8 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Badan PKPD | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dok | 9.280.000 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Badan PKPD | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dok | 9.280.000 | |
| 3 | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah dokumen pelaporan keuangan daerah** | **7 Subkegiatan** | **503.711.000** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah dokumen pelaporan keuangan daerah** | **7 Subkegiatan** | **503.711.000** | |
| 1 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 12 Lap | 10.200.400 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 12 Lap | 10.200.400 | |
| 2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Badan PKPD | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 4 Lap | 54.315.200 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Badan PKPD | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 4 Lap | 54.315.200 | |
| 3 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 1 Lap | 267.122.200 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 1 Lap | 267.122.200 | |

| NO | RANCANGAN RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Badan PKPD | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dok | 92.455.500 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Badan PKPD | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dok | 92.455.500 | |
| 5 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Badan PKPD | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dok | 40.985.500 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Badan PKPD | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dok | 40.985.500 | |
| 6 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Badan PKPD | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dok | 16.599.000 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Badan PKPD | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dok | 16.599.000 | |
| 7 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Badan PKPD | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 41 Orang | 22.033.200 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Badan PKPD | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 41 Orang | 22.033.200 | |
| **4** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah** | **3 Subkegiatan** | **356.840.426.138** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah** | **3 Subkegiatan** | **356.840.426.138** | |
| 1 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 3 Lap | 347.702.168.468 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 3 Lap | 347.702.168.468 | |
| 2 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Lap | 5.000.000.000 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Lap | 5.000.000.000 | |
| 3 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | 2 Lap | 4.138.257.670 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | 2 Lap | 4.138.257.670 | |
| **5** | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **Badan PKPD** | **Cakupan data yang digunakan dalam sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan** | **2 Subkegiatan** | **112.686.500** | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **Badan PKPD** | **Cakupan data yang digunakan dalam sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan** | **2 Subkegiatan** | **112.686.500** | |
| 1 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem InformasiPemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dok | 10.219.000 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem InformasiPemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dok | 10.219.000 | |
| 2 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Badan PKPD | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 123 Orang | 102.467.500 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Badan PKPD | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 123 Orang | 102.467.500 | |
| **3** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Badan PKPD** | **PERSENTASE ASET YANG DIKELOLA** | **75 %** | **563.944.700** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Badan PKPD** | **PERSENTASE ASET YANG DIKELOLA** | **75 %** | **563.944.700** | |

| NO | RANCANGAN RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah** | **8 Subkegiatan** | **563.944.700** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah** | **8 Subkegiatan** | **563.944.700** | |
| 1 | Penyusunan Standar Harga | Badan PKPD | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dok | 79.923.700 | Penyusunan Standar Harga | Badan PKPD | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dok | 79.923.700 | |
| 2 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dok | 15.054.000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dok | 15.054.000 | |
| 3 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Dok | 31.593.000 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Dok | 31.593.000 | |
| 4 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 2 Lap | 75.720.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 2 Lap | 75.720.000 | |
| 5 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 Lap | 145.650.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 Lap | 145.650.000 | |
| 6 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 2 Dok | 49.594.000 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 2 Dok | 49.594.000 | |
| 7 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 2 Lap | 38.754.000 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 2 Lap | 38.754.000 | |
| 8 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Lap | 127.656.000 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Lap | 127.656.000 | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Badan PKPD** | **PERSENTASE CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **4,03 %** | **1.027.859.800** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Badan PKPD** | **PERSENTASE CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **4,03 %** | **1.027.859.800** | |
| **1** | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah** | **8 Subkegiatan** | **1.027.859.800** | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | **Badan PKPD** | **Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah** | **8 Subkegiatan** | **1.027.859.800** | |
| 1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Badan PKPD | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 12 Unit | 164.250.000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Badan PKPD | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 12 Unit | 164.250.000 | |
| 2 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak | 12 Lap | 51.032.800 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak | 12 Lap | 51.032.800 | |
| 3 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan dan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 12 Lap | 9.076.800 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan dan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 12 Lap | 9.076.800 | |

| NO | RANCANGAN RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Badan PKPD | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 12 Obyek Pajak | 513.930.100 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Badan PKPD | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 12 Obyek Pajak | 513.930.100 | |
| 5 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 34 Dok | 126.279.300 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 34 Dok | 126.279.300 | |
| 6 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dok | 104.912.000 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Badan PKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dok | 104.912.000 | |
| 7 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Lap | 47.775.800 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Lap | 47.775.800 | |
| 8 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 1 Lap | 10.603.000 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Badan PKPD | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 1 Lap | 10.603.000 | |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan adalah pendapatan asli daerah karena dua sumber penerimaan lainnya sangat tergantung dari penetapan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan daerah terutama yang berasal penerimaan asli daerah, tanpa disadari akan melupakan substansi dari nilai-nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga OPD menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan dan asset daerah harus dilakukan secara tertib, efisien dan efektif. Ketepatan dalam pelayanan administrasi keuangan daerah, transparansi dalam kebijakan keuangan sangat dibutuhkan. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi,

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berusaha memberikan arah dan fokus strategi yang jelas dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, pengaturan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dan pembiayaan diupayakan untuk efisien dan efektif serta proposional. Hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh 41 Organisasi Perangkat Daerah.

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Didalam tujuan dan sasaran nasional yang dituang pada RPJMN Tahun 2020-2024, diselaraskan dengan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Penyelarasan RPJMN, RPD Provinsi Sumatera Utara dengan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026

| No | Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 | RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 | | RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran |
| 1 | Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan | Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas Pendidikan | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| | | | Meningkatnya derajatnya Kesehatan | | |
| | | | Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan | | |
| | | | Meningkatnya iklim demokrasi | | |
| | | | Peningkatan ketangguhan bencana | | |
| | | | Menurunnya angka kemiskinan | | |
| 2 | Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian | Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat |
| | | | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | | |
| | | | Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata | | |
| 3 | Menurunnya kesenjanga antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera | Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi | Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Infrastruktur dasar |

| No | Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 | RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 | | RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran |
| | | | Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman | | |
| | | | Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | |
| | | | Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah | | |
| 4 | Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan | | | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 5 | Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk | | | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 6 | Terpenuhinya layanan dasar | | | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 7 | Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda | | | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 8 | Terwujudnya pengentasan kemiskinan | | | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat |
| 9 | Meningkatnya Produktivitas dan daya saing | | | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 10 | Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya | | | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 11 | Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan | | | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 12 | Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial | | | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 13 | Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam keidupan masyarakat | | | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 14 | Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa | | | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 15 | Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, innovative dan kreatif | | | Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing |
| 16 | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar | | | Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Infrastruktur dasar |

| No | Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 | RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 | | RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran |
| 17 | Meningkatnya konektivitas wilayah | | | Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Infrastruktur dasar |
| 18 | Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan | | | | |
| 19 | Meningkatnya akses dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien | | | | |
| 20 | Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan eonomi | | | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat |
| 21 | Peningkatan kualitas lingkungan hidup | | | | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| 22 | Peningkatan ketahanan bencana dan iklim | | | Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| 23 | Pembangunan rendah karbon | | | Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| 24 | Meguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih |
| | | | Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | | |
| | | | Meningkatnya pelayanan publik yang prima | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah | | |

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

### Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga (3) tahun kedepan. Dimana tahun 2025 merupakan tahun awal tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau tahapan periode akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan peruaturan daerah Kabupaten Padang

Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
2. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maju
4. Mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

**Sasaran**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang memiliki indikator yang dapat diukur untuk mencapai tujuan pembangunan.

Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

1. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan prima
2. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat
4. Meningkatnya Infrastruktur dasar
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tujuan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai dasar utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan untuk mengetahui isi strategis, prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten padang lawas utara tahun 2024-2026, dari tujuan sasaran tersebut BPKPD mengacu kepada tujuan 1 “ Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih ” dengan sasaran

1 “ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima “. Dengan demikian tujuan sasaran BPKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATIOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Mewujudkan pengelolaan keuangan, Pendapatan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel | | Persentase pengelolaan keuangan, Pendapatan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel | Persen | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Nilai Akip BPKPD | Nilai | 66,87 | 71,87 | 76,87 |
| | | | Nilai IKM | Nilai | 78 | 80 | 82 |
| | | Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| | | | Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah | Persen | 3,71 | 4,03 | 4,26 |
| | | | Persentase Aset yang dikelola | Persen | 70% | 75% | 80% |

## 3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sehingga baik tujuan maupun sasaran yang direncanakan dan telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang

telah ditetapkan, tujuan, sasaran, visi dan misi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.

Berikut ini disajikan hasil pemetaan program dan kegiatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3889 Tahun 2021 serta Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

.

# Tabel 3.3.
# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PADANG LAWAS UTARA
# TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | **395.470.620.520,00** | **386.557.725.996,00** | **376.740.486.148,00** | **-18.730.134.372,00** | | | | | | | **386.995.395.300,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **395.470.620.520,00** | **386.557.725.996,00** | **376.740.486.148,00** | **-18.730.134.372,00** | | | | | | | **386.995.395.300,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **395.470.620.520,00** | **386.557.725.996,00** | **376.740.486.148,00** | **-18.730.134.372,00** | | | | | | | **386.995.395.300,00** | |
| 1, | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai Akip** | | | | **BB Nilai** | **BB Nilai** | **23.804.892.473,00** | **18.204.116.249,00** | **11.405.861.064,00** | **-8.131.296.194,00** | | | | | | | **15.673.596.279,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 113.203.500,00 | 113.203.500,00 | 93.798.600,00 | -19.404.900,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 66.586.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | dan penyelu dupan. | | | | | |
| | 5.02.01.2 .01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 36.534.000,00 | 37.369.200,00 | 37.369.200,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 14.097.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | **5** | **NON URUSAN** | | | | | | | **395.470.620.520,00** | **386.557.725.996,00** | **376.740.486.148,00** | **-18.730.134.372,00** | | | | | | | **386.995.395.300,00** | |
| | **5.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **395.470.620.520,00** | **386.557.725.996,00** | **376.740.486.148,00** | **-18.730.134.372,00** | | | | | | | **386.995.395.300,00** | |
| | 5.02.01.2 .01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **395.470.620.520,00** | **386.557.725.996,00** | **376.740.486.148,00** | **-18.730.134.372,00** | | | | | | | **386.995.395.300,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **395.470.620.520,00** | **386.557.725.996,00** | **376.740.486.148,00** | **-18.730.134.372,00** | | | | | | | **386.995.395.300,00** | |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 9.418.500,00 | 9.418.500,00 | 0,00 | -9.418.500,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 7.078.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.418.500,00 | 9.418.500,00 | 8.158.500,00 | -1.260.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 7.078.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.418.500,00 | 9.418.500,00 | 9.418.500,00 | 0,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 7.078.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.418.500,00 | 9.418.500,00 | 8.158.500,00 | -1.260.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 7.078.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 24.777.000,00 | 24.777.000,00 | 16.475.400,00 | -8.301.600,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 17.097.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 14.218.500,00 | 14.218.500,00 | 14.218.500,00 | 0,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 7.078.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase realisasi anggaran BPKPD* | | | | 93 persen | 93 persen | 21.121.119.073,00 | 15.032.623.749,00 | 8.748.575.864,00 | -12.372.543.209,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 13.028.607.879,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/bulan | 35 Orang/bulan | 20.521.837.573,00 | 14.433.342.249,00 | 8.409.947.964,00 | -12.111.889.609,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 12.406.123.779,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 524.280.000,00 | 524.280.000,00 | 299.190.000,00 | -225.090.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 557.400.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.970.500,00 | 33.970.500,00 | 17.737.700,00 | -16.232.800,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 25.517.100,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.515.500,00 | 20.515.500,00 | 10.850.100,00 | -9.665.400,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 20.251.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | dan penyelu dupan. | | | | | |
| | 5.02.01.2 .02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.515.500,00 | 20.515.500,00 | 10.850.100,00 | -9.665.400,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 19.315.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 67.539.000,00 | 135.539.000,00 | 35.925.000,00 | -31.614.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 71.025.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 24.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 0 Paket | 5.535.000,00 | 73.535.000,00 | 0,00 | -5.535.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 5.535.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.502.000,00 | 29.502.000,00 | 16.462.500,00 | -13.039.500,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 20.745.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.502.000,00 | 29.502.000,00 | 16.462.500,00 | -13.039.500,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 20.745.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.091.113.900,00 | 1.087.053.900,00 | 842.954.200,00 | -248.159.700,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 1.261.843.700,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.198.000,00 | 13.198.000,00 | 18.144.000,00 | 4.946.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 13.198.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 343.378.700,00 | 343.378.700,00 | 293.426.800,00 | -49.951.900,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 268.485.100,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50.449.700,00 | 55.449.700,00 | 65.206.900,00 | 14.757.200,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 19.046.600,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 73.100.000,00 | 73.100.000,00 | 82.933.000,00 | 9.833.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 73.100.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 78.543.500,00 | 78.543.500,00 | 78.543.500,00 | 0,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 42.472.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 42.624.000,00 | 42.624.000,00 | 42.624.000,00 | 0,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 44.424.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 70 Laporan | 70 Laporan | 489.820.000,00 | 480.760.000,00 | 262.076.000,00 | -227.744.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 801.118.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah pengadaan kenderaan dinas operasional* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 230.000.000,00 | 603.779.100,00 | 427.320.400,00 | 197.320.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 85.543.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 523.779.100,00 | 347.320.400,00 | 197.320.400,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 5.543.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 80.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 744.787.000,00 | 744.787.000,00 | 798.897.000,00 | 54.110.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 823.200.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 351.200.000,00 | 351.200.000,00 | 375.200.000,00 | 24.000.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 324.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 62.315.000,00 | 62.315.000,00 | 81.025.000,00 | 18.710.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 57.200.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 316.272.000,00 | 316.272.000,00 | 330.672.000,00 | 14.400.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 432.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 437.130.000,00 | 487.130.000,00 | 458.390.000,00 | 21.260.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 336.790.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 330.950.000,00 | 380.950.000,00 | 231.500.000,00 | -99.450.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 326.010.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 106.180.000,00 | 106.180.000,00 | 226.890.000,00 | 120.710.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 10.780.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1, | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **369.678.778.247,00** | **365.557.940.147,00** | **362.276.123.484,00** | **51.216.274,00** | | | | | | | **369.729.994.521,00** | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Jumlah subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen rencana anggaran* | | | | 8 Subkegiatan | 8 Subkegiatan | 1.100.001.000,00 | 1.412.689.600,00 | 1.270.027.200,00 | 170.026.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 1.199.996.600,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 59.367.000,00 | 77.196.000,00 | 64.624.000,00 | 5.257.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 52.313.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | narkoba, judi, dan penyelu dupan. | | | | | |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 59.367.000,00 | 77.586.000,00 | 65.274.000,00 | 5.907.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 52.193.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 41 Dokumen | 41 Dokumen | 300.000,00 | 1.430.000,00 | 16.766.400,00 | 16.466.400,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 25.537.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 41 Dokumen | 41 Dokumen | 300.000,00 | 1.430.000,00 | 22.696.800,00 | 22.396.800,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 25.537.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 705.124.000,00 | 751.506.500,00 | 737.474.000,00 | 32.350.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 732.291.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 266.233.000,00 | 311.967.500,00 | 322.934.000,00 | 56.701.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 158.018.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 9.310.000,00 | 191.573.600,00 | 40.258.000,00 | 30.948.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 101.743.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 52.364.100,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Jumlah laporan perbendaharaan daerah* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 8.043.024.482,00 | 8.081.641.982,00 | 7.956.251.266,00 | -86.773.216,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 11.073.174.283,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 196.770.000,00 | 196.770.000,00 | 178.982.800,00 | -17.787.200,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 127.580.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* | | | | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | 6.260.000,00 | -13.140.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 19.400.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.493.491.982,00 | 7.493.491.982,00 | 7.558.122.966,00 | 64.630.984,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 10.775.641.783,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 56.127.500,00 | 94.745.000,00 | 66.039.800,00 | 9.912.300,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 13.847.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* | | | | 41 Dokumen | 41 Dokumen | 19.626.400,00 | 19.626.400,00 | 7.014.000,00 | -12.612.400,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 19.626.400,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 202.845.400,00 | 202.845.400,00 | 128.204.500,00 | -74.640.900,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 68.695.400,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 40.588.200,00 | 40.588.200,00 | 11.627.200,00 | -28.961.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 39.103.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 14.175.000,00 | 14.175.000,00 | 0,00 | -14.175.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 9.280.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *Jumlah dokumen pelaporan keuangan daerah* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 652.961.000,00 | 752.961.000,00 | 816.435.700,00 | 163.474.700,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 503.711.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.200.400,00 | 10.200.400,00 | 66.532.200,00 | 56.331.800,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 10.200.400,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 54.315.200,00 | 54.315.200,00 | 43.116.600,00 | -11.198.600,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 54.315.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 332.050.500,00 | 332.050.500,00 | 332.050.500,00 | 0,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 267.122.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 176.777.200,00 | 276.777.200,00 | 250.509.600,00 | 73.732.400,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 92.455.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.985.500,00 | 40.985.500,00 | 86.539.400,00 | 45.553.900,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 40.985.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.599.000,00 | 16.599.000,00 | 28.966.600,00 | 12.367.600,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 16.599.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 41 Orang | 41 Orang | 22.033.200,00 | 22.033.200,00 | 8.720.800,00 | -13.312.400,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 22.033.200,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | dan penyelu dupan. | | | | | |
| | 5.02.02.2 .04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Jumlah kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 359.722.105.265,00 | 355.111.343.565,00 | 351.997.569.218,00 | -7.724.536.047,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 356.840.426.138,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2 .04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 351.061.014.600,00 | 346.450.252.900,00 | 343.117.697.400,00 | -7.943.317.200,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 347.702.168.468,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 5.000.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.661.090.665,00 | 5.661.090.665,00 | 5.879.871.818,00 | 218.781.153,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 4.138.257.670,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | *Cakupan data yang digunakan dalam sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan* | | | | 100 persen | 100 persen | 160.686.500,00 | 199.304.000,00 | 235.840.100,00 | 75.153.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 112.686.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.219.000,00 | 10.219.000,00 | 111.303.700,00 | 101.084.700,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 10.219.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 123 Orang | 123 Orang | 150.467.500,00 | 189.085.000,00 | 124.536.400,00 | -25.931.100,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 102.467.500,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2, | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | **80 persen** | **80 persen** | **663.180.000,00** | **763.180.000,00** | **891.675.100,00** | **-99.235.300,00** | | | | | | | **563.944.700,00** | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 663.180.000,00 | 763.180.000,00 | 891.675.100,00 | 228.495.100,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 563.944.700,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.723.700,00 | 60.723.700,00 | 59.616.000,00 | -1.107.700,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 79.923.700,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | narkoba, judi, dan penyelu dupan. | | | | | |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.790.800,00 | 16.790.800,00 | 13.494.000,00 | -3.296.800,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 15.054.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 60.057.500,00 | 60.057.500,00 | 29.995.500,00 | -30.062.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 31.593.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 137.692.000,00 | 137.692.000,00 | 432.753.400,00 | 295.061.400,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 75.720.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 54.924.000,00 | 54.924.000,00 | 25.896.000,00 | -29.028.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 134.232.000,00 | 234.232.000,00 | 207.320.200,00 | 73.088.200,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 145.650.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 49.394.000,00 | 49.394.000,00 | 25.068.000,00 | -24.326.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 49.594.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 38.754.000,00 | 38.754.000,00 | 14.988.000,00 | -23.766.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 38.754.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 110.612.000,00 | 110.612.000,00 | 82.544.000,00 | -28.068.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 127.656.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 3, | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah** | | | | **100 persen** | **100 persen** | **1.323.769.800,00** | **2.032.489.600,00** | **2.166.826.500,00** | **-295.910.000,00** | | | | | | | **1.027.859.800,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 1.323.769.800,00 | 2.032.489.600,00 | 2.166.826.500,00 | 843.056.700,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kabupaten Padang Lawas Utara | | 1.027.859.800,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | penyelu dupan. | | | | | |
| | 5.02.04.2 .01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 231.200.000,00 | 490.750.200,00 | 521.700.200,00 | 290.500.200,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 164.250.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2 .01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 60.199.000,00 | 116.868.200,00 | 37.708.000,00 | -22.491.000,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 51.032.800,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 9.076.800,00 | 9.076.800,00 | 0,00 | -9.076.800,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 9.076.800,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya* | | | | 12 Obyek Pajak | 12 Obyek Pajak | 663.180.000,00 | 963.179.800,00 | 1.063.400.100,00 | 400.220.100,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 513.930.100,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* | | | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 164.617.000,00 | 164.617.000,00 | 137.007.600,00 | -27.609.400,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 126.279.300,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 156.494.000,00 | 248.994.000,00 | 367.674.400,00 | 211.180.400,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 104.912.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 39.003.000,00 | 39.003.600,00 | 39.336.200,00 | 333.200,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 47.775.800,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah /Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Padang Lawas Utara, Padang Bolak, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | 10.603.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| | **JUMLAH** | | | | | | | | **395.470.620.520,00** | **386.557.725.996,00** | **376.740.486.148,00** | **174.003.710.008,00** | | | | | | | **386.995.395.300,00** | |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKPD

Program kerja operasional merupakan proses penentuan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 yaitu :

| Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | | 395.470.620.520,00 |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | 395.434.086.520,00 |
| KEUANGAN | | 395.434.086.520,00 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BB Nilai | 23.768.358.473,00 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 76.669.500,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 9.418.500,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 9.418.500,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 9.418.500,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1 Dokumen | 9.418.500,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 24.777.000,00 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 14.218.500,00 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 93 persen | 21.121.119.073,00 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/bulan | 20.521.837.573,00 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 524.280.000,00 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 33.970.500,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 20.515.500,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1 Laporan | 20.515.500,00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 67.539.000,00 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 3.000.000,00 |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 5.535.000,00 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 29.502.000,00 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 29.502.000,00 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 1.091.113.900,00 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | 13.198.000,00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Paket | 343.378.700,00 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1 Paket | 50.449.700,00 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2 Paket | 73.100.000,00 |

| Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 Paket | 78.543.500,00 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4 Dokumen | 42.624.000,00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan | 489.820.000,00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Unit | 230.000.000,00 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 Unit | 150.000.000,00 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | 80.000.000,00 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Laporan | 744.787.000,00 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 15.000.000,00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Laporan | 351.200.000,00 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Laporan | 62.315.000,00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 316.272.000,00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Unit | 437.130.000,00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 18 Unit | 330.950.000,00 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | 106.180.000,00 |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 100 persen | 369.678.778.247,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 8 Subkegiatan | 1.100.001.000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 3 Dokumen | 59.367.000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 3 Dokumen | 59.367.000,00 |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 41 Dokumen | 300.000,00 |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 41 Dokumen | 300.000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 705.124.000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 266.233.000,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dokumen | 9.310.000,00 |
| Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 50 Orang | 0,00 |
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 8 Laporan | 8.043.024.482,00 |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 1 Dokumen | 196.770.000,00 |
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 200 Dokumen | 19.400.000,00 |
| Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 1 Dokumen | 7.493.491.982,00 |
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 1 Dokumen | 56.127.500,00 |
| Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 41 Dokumen | 19.626.400,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 2 Laporan | 202.845.400,00 |
| Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 12 Dokumen | 40.588.200,00 |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | 14.175.000,00 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 7 Laporan | 652.961.000,00 |

| Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 12 Laporan | 10.200.400,00 |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 4 Laporan | 54.315.200,00 |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 332.050.500,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 176.777.200,00 |
| Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 40.985.500,00 |
| Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 16.599.000,00 |
| Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 41 Orang | 22.033.200,00 |
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 3 Laporan | 359.722.105.265,00 |
| Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 3 Laporan | 351.061.014.600,00 |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | 3.000.000.000,00 |
| Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 5.661.090.665,00 |
| Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 100 persen | 160.686.500,00 |
| Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 10.219.000,00 |
| Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 123 Orang | 150.467.500,00 |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 80 persen | 663.180.000,00 |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | 8 Laporan | 663.180.000,00 |
| Penyusunan Standar Harga | 1 Dokumen | 60.723.700,00 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 16.790.800,00 |
| Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 60.057.500,00 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 137.692.000,00 |
| Inventarisasi Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 54.924.000,00 |
| Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 134.232.000,00 |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 49.394.000,00 |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 38.754.000,00 |
| Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 110.612.000,00 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 100 persen | 1.323.769.800,00 |
| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 8 Dokumen | 1.323.769.800,00 |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 12 Unit | 231.200.000,00 |
| Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 12 Laporan | 60.199.000,00 |
| Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 12 Laporan | 9.076.800,00 |
| Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 12 Obyek Pajak | 663.180.000,00 |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah | 34 Dokumen | 164.617.000,00 |
| Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 156.494.000,00 |
| Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 39.003.000,00 |
| Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 0,00 |
| NON URUSAN | | 36.534.000,00 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | 36.534.000,00 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BB Nilai | 36.534.000,00 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 36.534.000,00 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 36.534.000,00 |
| | | **395.470.620.520,00** |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk indikasi program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025. Hal ini tidak lain dalam rangka menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi kelembagaan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan asset serta barang daerah sekaligus peningkatan PAD sebagai operasionalisasi pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) BPKPD selanjutnya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, sehingga dilakukan pemetaan agar tetap sesuai dan sejalan dengan target dan capaian Renstra dan RPJMD.

Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan kegiatan dan target kinerja dalam pencapaian target Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026. Akan tetapi Rencana Kerja ini akan dapat dilaksanakan dengan optimal jika mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama seluruh aparatur yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara baik secara moril maupun materiil.

Gunungtua, 28 Juli 2025

**KEPALA BADAN PKPD**
**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**BANGUN PARLAUNGAN, SE, MM**
**PEMBINA TK. I**
**NIP. 19821201 200904 1 003**